



Available online at: prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev

Proceeding of Community Development

Volume 1 (2017): 135-145; DOI: <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.18>

“Memberdayakan Masyarakat Melalui Inklusi dan Literasi Keuangan untuk Pembangunan”

Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal

M. Aulia Rachman, Syamsuddin

Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro
Jl. Hayam Wuruk No. 5, Pleburan, Semarang Indonesia
E-mail: maulrachman@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi dengan merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi. Konsep ini memberikan aktifitas baru bagi pembangunan, yakni yang bersifat “*social participation, productivity, empowering, and sustainable*”. Peran pemberdayaan juga merupakan suatu upaya menumbuhkan partisipasi dan kemandirian sehingga memberikan dampak bagi tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas untuk memiliki kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pemerintah dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) memiliki peranan yang penting sebagai *stakeholder* dalam meningkatkan pemberdayaan, khususnya bagi warga miskin dan kawasan tertinggal. Guna menunjang potensi dan pemerataan pemberdayaan diperlukan bentuk inern antara institusi dan NGO dalam program yang dijalankan. Pada penulisan makalah ini akan memberikan gambaran tentang program pemberdayaan yang digagas oleh NGO ataupun pemerintah dan memberikan bentuk gagasan sinergitas antar lembaga guna memaksimalkan output yang diharapkan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk dapat melihat potensi dan perkembangan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh institusi dan NGO, serta memberikan strategi dalam upaya membentuk sinergi antar lembaga dan institusi pemerintah.

Kata Kunci: sinergi; kemitraan; NGO; pemberdayaan

Abstract

Economic empowerment becomes an important aspect of economic development by summarizing social and economic values. This concept provides new activities for development, which are "social participation, productivity, empowering, and sustainable". The role of empowerment is also an effort to foster participation and independence to provide an impact on the individual, group, institutional and community level to have much better welfare. Governments and NGOs have an important role as stakeholders in enhancing empowerment, especially for the poor and disadvantaged areas. To support the potential and equity of empowerment, it needs an inherent form between institutions and NGOs in the program. In writing this paper will provide an overview of the empowerment program initiated by NGOs or government and provide the idea of synergy between institutions to maximize the expected output. The purpose of writing this paper is to be able to see the potential and development of economic empowerment implemented by institutions and NGOs, and provide strategies to establish synergies between institutions and government institutions.

Keywords: synergy; partnership; NGO; empowermen

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan menjadi permasalahan yang sudah lazim pada suatu negara. Pemerintah terus mendorong dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan, program maupun bantuan. Terdapat program-program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, program-program tersebut meliputi Program Inpres Desa Tertinggal (PIDT), Kredit Usaha Tani, Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Gerdu Taskin, serta Program Kredit Mikro, namun usaha-usaha tersebut belum secara drastis terlihat hasilnya (BP-PK, 2002).

Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam menangani permasalahan kemiskinan, diperlukan keterkaitan dan partisipasi masyarakat luas dalam menangani permasalahan ini. NGO dapat menjadi partner bagi pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan (Adenansi et al., 2016). Hal ini dikarenakan NGO memiliki informasi yang memadai dan lebih berinteraksi langsung dengan masyarakat. Para NGO itu sendiri juga dalam program internal mereka dalam pengentasan kemiskinan dinilai kurang optimal, hal ini dikarenakan pada NGO yang cenderung memiliki warna, nilai, karakter, visi dan misi tersendiri sehingga cenderung bekerja dengan kapasitasnya masing-masing.

Perlu upaya dalam mendorong modal sosial dalam mengatasi kemiskinan, modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat (atau bangsa) guna mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi untuk mencapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat atau bangsa tersebut (Durkheim, 1973). Kurang optimalnya program pengentasan kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sinergi antar aktor pembangunan (World bank, 2002). Kurangnya reorientasi, kapasitas, sumber daya manusia dan pengetahuan menjadi kurang efisien dalam pengembangan dan keberlanjutan penancangan program pemberdayaan (Ulleberg, 2009)

Menurut permasalahan diatas, diperlukan upaya dalam membangun sinergitas dan kolaborasi antara institusi dalam memaksimalkan program pengentasan kemiskinan. Pada penulisan makalah ini akan membahas tentang potensi institusi pemerintah maupun NGO dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan. Serta membahas bentuk kemitraan dan sinergi dalam upaya pelaksanaan program yang lebih efisien dan efektif. Tujuan dari penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bentuk sinergi antara institusi dan memberikan alur kebijakan dan strategipemerintah dalam membentuk sinergi antara institusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan memberikan gagasan terkait sinergi antara lembaga sosial dalam upaya memaksimalkan program pemberdayaan di daerah tertinggal dan mengentaskan kemiskinan. Analisa akan dilakukan dari hal-hal khusus menuju gagasan dan kesimpulan umum. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan penalaran induktif analitik, yaitu penalaran yang mendasarkan pada data dan informasi yang bersumber dari artikel, jurnal, seminar prosiding, buku ataupun dokumen yang relevan.

Pemberdayaan dan Peran NGO

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan (Hutomo, 2000). Pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi terutama bagi orang miskin (Narayan, 2000), serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan (Alkire, 2009 and Trommlerova et al., 2015). Pemberdayaan adalah proses perubahan yang berfokus pada perluasan jangkauan pilihan yang dapat dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat (Kabeer, 1998).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan organisasi yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, memperhatikan kepentingan orang miskin, melindungi dan menjaga lingkungan, menyediakan layanan dasar sosial dan melakukan pengembangan masyarakat (Cleary, 1997), yang memiliki 3 unsur: pelaksana, katalisator dan mitra (Lewis, 2007). NGO merupakan lembaga independen yang tidak dijalankan oleh pemerintah dan bukan bekerja atas dasar profit. Scholte (2004) menyatakan bahwa LSM dibedakan sesuai dengan fokus

pekerjaan mereka, sementara beberapa dikelompokkan menurut tingkat operasi. Beberapa NGO diorganisir seputar isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan dan berbeda tergantung pada misi, visi, tujuan, dan mandat mereka (Stoddard, 2006).

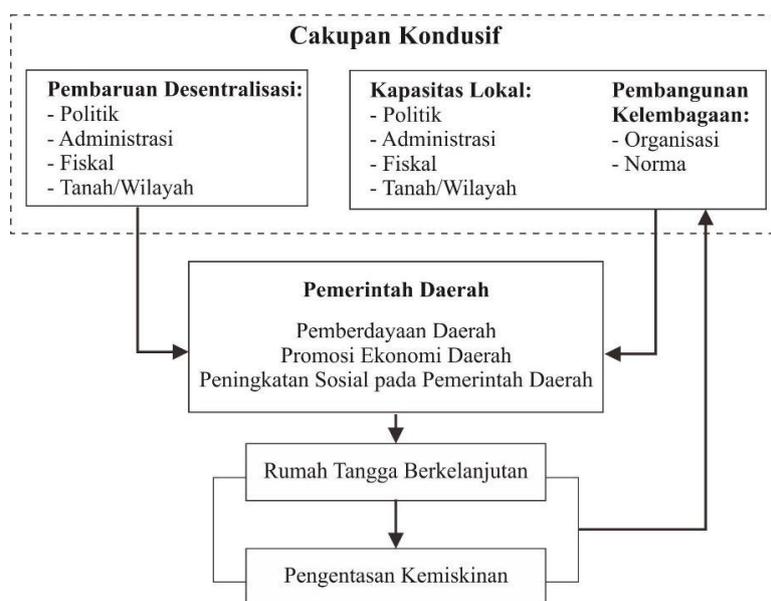
NGO sebagai salah satu organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela juga memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) sebagai fasilitator dan katalisator; (2) sebagai pelatih dan pendidik; (3) sebagai pemupukan modal; (4) penyelenggaraan proyek-proyek stimulant; (5) sebagai *agent advocacy*; serta (6) sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat. Selain keterlibatan LSM sebagai salah satu *stakeholder*, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting yang menjadi faktor keberhasilan program tersebut (Pratama, 2015). LSM melakukan kegiatan pemberdayaan dengan latar belakang sosial-ekonomi dalam meningkatkan kemandirian dan partisipasi pembangunan (Nano, 2008).

Studi empiris menyatakan bahwa peran NGO dapat program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Riddel dan Robinson (1992) partisipasi NGO di Negara Uganda memberikan *multiplier effect* dalam permintaan barang dan jasa dan tenaga kerja, Nano (2008) menyatakan bahwa peran LSM dapat meningkatkan *life-skill* dan rasa percaya diri nelayan di daerah pesisir, Mohamed (2010) di Kenya, LSM dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan, Sahley dan Pratt (2003) menyatakan peran LSM memiliki peran dalam mempengaruhi kebijakan publik untuk mengatasi kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan. Danar (2011) dalam Dias (2012) NGO dapat meningkatkan pendapat usaha tani di Kabupaten Boyolali. Rachman, et al. (2017) lembaga sosial *baitul maal wa tamwil* (BMT) dapat meningkatkan pendapatan berkelanjutan warga miskin di kota Semarang dengan bentuk bantuan modal dan pembinaan.

Mobilitas Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Karsidi, 2011), sehingga dengan pemberdayaan dapat meningkatkan power masyarakat, gairah pasar dan menumbuhkan pembangunan suatu negara. Peran pemerintah selaku pemangku kebijakan sangatlah penting dalam menunjang pemberdayaan ekonomi pedesaan maupun masyarakat miskin, terutama dalam bentuk desentralisasi daerah. Dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal. Dalam menanggulangi kemiskinan ditempuh dengan meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal. Akses permodalan, akses pasar, edukasi, peningkatan kapasitas sumber daya alam dan memperkuat aktifitas produksi.

Komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dituangkan dalam Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), kebijakan desentralisasidan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Terdapat 19 kementerian dalam menangani kemiskinan dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 3-4% jumlah penduduk pada tahun 2019. Terdapat banyak program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, terutama dalam program pemberdayaan ekonomi seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendamping dan Dana Desa, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), ataupun pembentukan insntansi seperti Badan Pelatihan Kerja (BLK).



Gambar 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan

Sumber: Angelo, B. (2003)

Peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya peningkatan pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi daerah tertinggal maupun masyarakat miskin. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dapat mengagas pemberdayaan legal (*legal empowerment*) melalui hukum, legeslatif, judikal dan resolusi dalam memberdayakan daerah tertinggal maupun masyarakat miskin (USAID, 2007), pemerintah juga memiliki dana yang besar dengan SDM yang memadai dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi yang lebih sustainabel, tetapi sejatinya belum dapat mengapai masyarakat luas. Terdapat banyak penelitian terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi, Taufiq (2013) bahwa pemberdayaan pesisir pantai di Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat berupa dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan nelayan. Putra (2015) pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur dapat mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam keikutsertaan dalam pameran internasional dan nasional dan pengurusan HAKI. Ndamu (2017) peran pemerintah Negara Nigeria dapat menunjang kopotensi wirausaha muda.

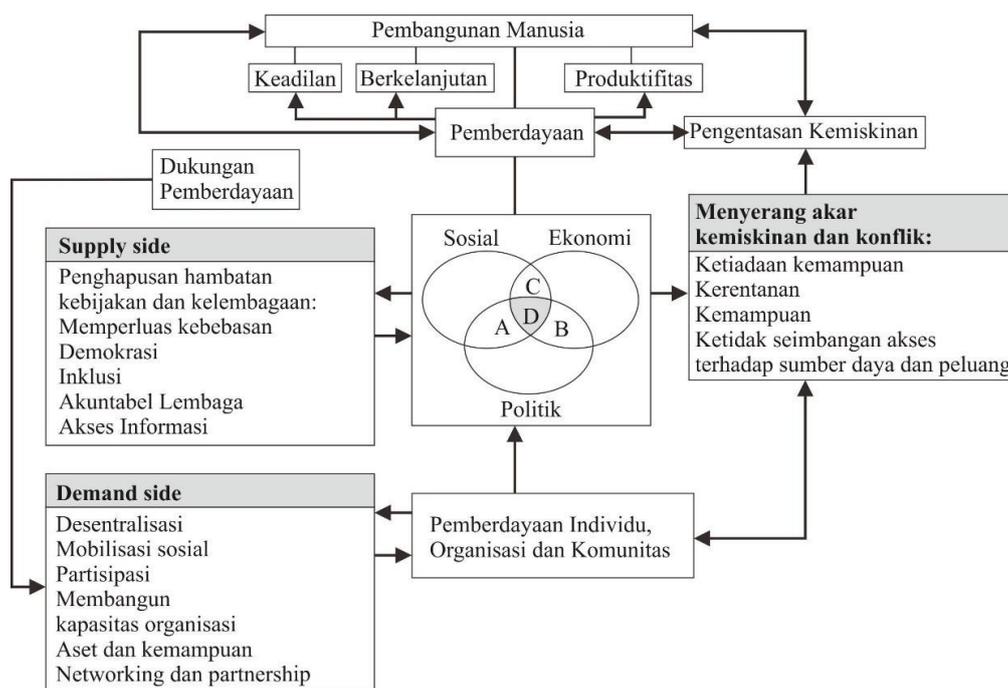
Sinergi dan Kemitraan Antar Lembaga dalam Upaya Peberdayaan

Kebutuhan untuk koordinasi, kemitraan, kelengkapan dan sinergi menjadi konsep penting dalam menjalankan pemberdayaan yang berkelanjutan. Sinergi adalah proses di mana dua atau lebih tindakan digabungkan untuk menghasilkan efek yang lebih besar daripada jumlah bagiannya masing-masing (HHI, 2011). Menurut Vasconcellos, M. dan Vasconcellos, A. (2009), kemitraan dan sinergi mengandung rasa kerjasama, saling percaya dan sinergi antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar ini, kemitraan berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pemangku kepentingan untuk menggabungkan sumber daya yang berbeda dalam melakukan pendekatan bersama untuk mencapai tujuan bersama (McQuaid, 2000; Lewis, 2000; Penrose, 2000). Dalam konteks ini, motif kemitraan tidak dibentuk oleh gagasan tentang keuntungan material atau pemaksaan mitra yang terdaftar, namun oleh suatu tujuan bersama yang didukung oleh kepercayaan antara para aktornya (Vasconcellos, M. dan Vasconcellos, A., 2009).

Peran kemitraan dalam pola pemberdayaan dapat menunjang inklusi pemberdayaan pada daerah-daerah terpencil. NGO sebagai salah satu *stakeholder* dalam upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam upaya pembangunan manusia (Dhakal, 2002). Kemitraan antara organisasi dengan kekuatan yang berbeda, seperti kapasitas administratif dan pengetahuan teknis lokal, dinilai lebih efektif dalam menjalankan program bersama (Foster, 2005; Kelli dan Roche, 2014).

Pola dan konsep sinergitas antar institusi NGO maupun dengan pemerintah telah banyak diajukan dalam program pemberdayaan, seperti kemitraan antara World Bank dengan NGO di Gambia, Ekouadordan Guatemala (Brautigam et al, 2007), Kebijakan Nasional dalam Kemitraan antara NGO di Uganda (*Ministry of Internal Affairs of Uganda*, 2010), kemitraan antara pemerintah dengan organisasi lokal dalam pemberdayaan pedesaan di wilayah Amazon, Brazil (Vasconcellos, M. dan Vasconcellos, A., 2009), Sinergi antara NGO dan Pemerintah di Indonesia dan India (Suharko, 2007) dan kemitraan antara NGO dengan perusahaan di Asia Pasifik (Yamamoto, 1999).

LANDASAN KONSEPTUAL Pola Pemberdayaan dalam Pembangunan Manusia



Gambar 2. Kerangka Konseptual Pemberdayaan dan Pembangunan Manusia

Sumber: UNDP (2004)

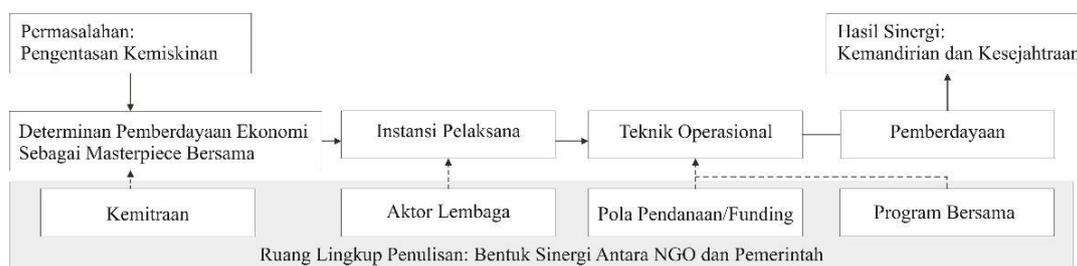
Pemberdayaan ekonomi menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi dengan merangkum nilai-nilai sosial dan ekonomi, terutama bagi kawasan tertinggal dan masyarakat miskin. Konsep ini memberikan aktifitas baru bagi pembangunan, yakni yang bersifat *“social participation, productivity, empowering, and sustainable”*. Peran pemberdayaan juga merupakan suatu upaya menumbuhkan partisipasi dan kemandirian sehingga memberi dampak bagi tingkat individu,

kelompok, kelembagaan maupun komunitas untuk memiliki kesejahteraan yang jauh lebih baik, sehingga memiliki *power, control* dan menggunakan peluang dalam menghasilkan output yang maksimal. World Bank (2002) menyatakan dalam memaksimalkan fungsi pemberdayaan harus memiliki 4 elemen: inklusi/partisipasi, akses informasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal.

Mobilisasi Sosial dalam Mendorong Potensi Pemberdayaan

Mobilisasi sosial adalah proses menyatukan semua aktor lintas sektoral dan praktis untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan akan program tertentu, untuk membantu memenuhi sumber daya dan layanan; dan untuk memperkuat partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong kemandirian. Mobilisasi sosial dapat dilihat sebagai proses partisipasi semua pemangku kepentingan untuk pencapaian tujuan bersama (*Ministry of Public Health And Sanitation of Harambe, 2010*). Dukungan katalitik dari mobilisasi sosial eksternal memainkan peran penting dalam inisiasi pemberdayaan. Agen mobilisasi sosial eksternal dalam mendukung pemberdayaan adalah pemerintah, NGO, donatur dan lembaga keuangan (UNDP, 2004). Peran NGO dan Pemerintah dalam pemberdayaan sangat penting dalam mendorong akselerasi masyarakat. Peran penting NGO dalam mendukung proses desentralisasi sekarang umumnya diterima oleh kebanyakan orang. Bentuk relasi dan sinergi antara agen mobilisasi dalam pola pemberdayaan sangatlah penting untuk memperluas jaringan dan memperkuat mobilisasi pemberdayaan.

Alur Pikir Penulisan



Gambar 3. Alur Pikir Penulisan

Berdasarkan serangkaian kajian pustaka yang telah dibahas sebelumnya, maka alur pikir yang difokuskan pada empat variabel-mengadopsi alur pikir Darwanto (2013)- sebagai berikut:

Pertama: variabel pola Sinergi Bersama oleh sesama NGO baik yang dimobilisasi oleh aktor NGO itu sendiri ataupun oleh institusi pemerintah dengan NGO yang ada dan partisipasi masyarakat. Atau pun berupa arahan atau kebijakan pemerintah ataupun kementerian terkait pengentasan kemiskinan dalam mendorong potensi dan sinergi NGO di masing-masing wilayah dalam mendorong mobilisasi sosial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan.

Kadua: variabel aktor, penulisan ini mengidentifikasi instansi yang terkait dan terlibat dalam optimalisasi pemberdayaan, bentuk sinergi yang diajukan mencakup NGO dan instansi pemerintah, ataupun instansi lainnya seperti universitas dalam pengembangan penelitian ataupun pengusaha (Brown, 2009). Aktor yang dimaksudkan antara lain NGO dan pemerintah sebagai faktor utama, dan partisipasi masyarakat, donatur, universitas (sebagai lembaga penelitian) dan lain sebagainya.

Ketiga: variabel Pendanaan/Funding sangatlah penting sebagai salah satu sumber dana program (Dhakal, 2002) yang merupakan faktor produksi, pendanaan dapat berasal dari sharing antar institusi maupun dari donasi masyarakat. Masing-masing NGO dapat menggali peluang dan potensi funding

secara bersama sehingga dapat membentuk persepsi donatur ataupun lembaga donasi lainnya, bahwa dengan diampu secara bersinergi dapat mengoptimalkan peran lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Kempat: variabel kegiatan dan program bersama, hal ini berupa upaya membuat program pemberdayaan bersama melalui tahapan pemetaan daerah tertinggal dan potensi daerah tersebut, perencanaan, eksekusi dan supervisi. Sehingga dapat membentuk masterpiece pemberdayaan daerah tersebut yang memiliki nilai yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pola mobilisasi sosial dalam upaya sinergi antar lembaga dapat menciptakan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi, dengan menyesuaikan kerangka dan bingkai kegiatan yang didefinisikan sebagai "konstruksi kerangka prognosis baru yang memotivasi dan mendisiplinkan interaksi lintas sektor mitra dengan mempertahankan kontribusi yang berbeda terhadap penciptaan nilai" dengan mempertahankan karakteristik masing-masing lembaga (Le Ber dan Branzei, 2010). Pola konstruksi tersebut adalah:

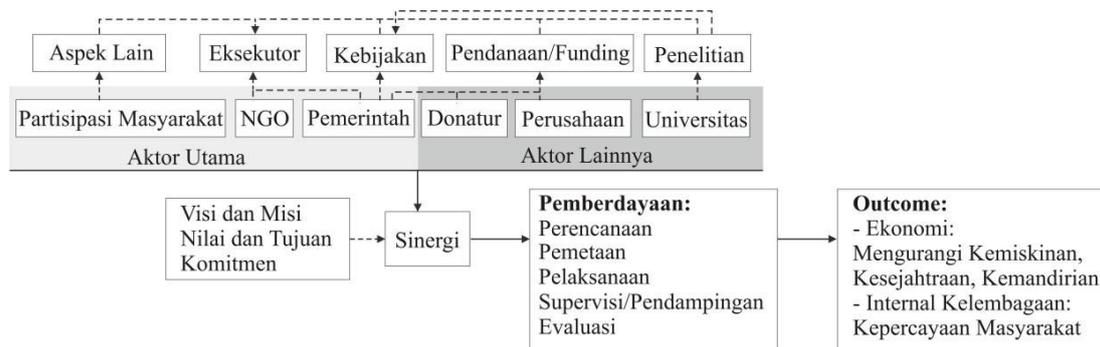
Bentuk Sinergi: Bentuk sinergi dapat dilakukan dalam bentuk merangkul semua elemen *stakeholder*, dalam hal ini dapat berupa pemerintah dengan NGO, ataupun sesama NGO, ataupun dengan aktor lainnya seperti donatur sebagai sumber pendanaan, perusahaan ataupun universitas sebagai institusi penelitian. Austin (2000) menyatakan bahwa sinergi/kemitraan yang digambarkan berkembang melalui tiga fase: dermawan (donor amal dan penerima), transaksional (pertukaran sumber daya yang berfokus pada kegiatan tertentu) dan integratif (misi bersama dan aktivitas mulai bergabung menjadi tindakan kolektif dan integrasi organisasi), yang memungkinkan peningkatan komplementaritas sumber daya, kesesuaian pada misi, nilai dan tujuan. Desain kemitraan mencakup percobaan dengan proses kemitraan prosedural dan substantif, seperti: menetapkan tujuan dan spesifikasi struktural; merumuskan peraturan dan peraturan; menyusun nota kesepahaman; membangun posisi kepemimpinan; menentukan struktur organisasional; menyetujui manajemen kemitraan (Austin dan Seitanidi, 2000).

Aktor dan Peran: Pemerintah dapat bekerja sebagai pemegang kebijakan, sumber dana, pengagas ataupun sebagai leader; sedangkan NGO dapat berperan sebagai eksekutor, pengendali masa ataupun intermediasi antara donatur kepada program. Jika hubungan kemitraan antara NGO, maka setiap NGO dapat memegang peranan masing-masing sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan donatur, dana sosial perusahaan –*Corporate Social Responsibility* (CSR)- dan universitas berperan diluar variabel teknis atau sebagai aktor mobilisasi eksternal. Donatur masyarakat ataupun dana CSR sebagai sumber pendanaan dan universitas berperan sebagai lembaga peneliti yang meningkatkan produk ataupun penilaian pada efektifitas kerja.

Mekanisme: Teknik pembentukan sinergi dan kemitraan diawali dengan membentuk visi dan misi bersama dan saling memiliki kepercayaan dalam upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Proses tersebut melalui komitmen bersama pada nilai-nilai ekonomi sosial dan tujuan bersama; dan bentuk saling penguatan dengan penilaian yang memadai terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam memenuhi aspek-aspek pemberdayaan, dalam konteks ini tidak semua unsur dapat disenergikan. Bentuk sinergi menekankan pembagian atau pertukaran sumber daya sebagai ciri kemitraan kolaboratif. Mengidentifikasi empat jenis hubungan yang berbeda mulai dari jaringan, hingga koordinasi, kerja sama dan akhirnya berkolaborasi, sehingga terdapat hubungan tingkat dalam melibatkan peningkatan berbagi risiko dan sumber daya terhadap pencapaian tujuan bersama.

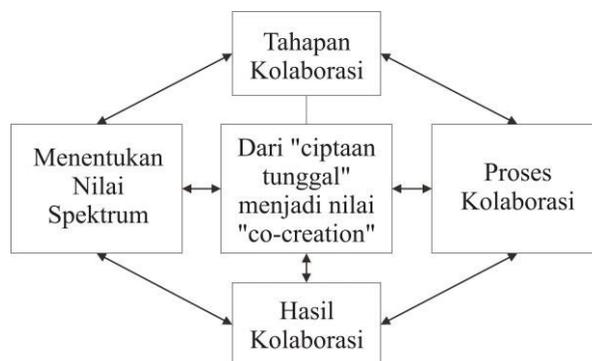
Menyusun dan menetapkan fundamental program dan mengusulkan pembagian tanggungjawab antara masing-masing *stakeholder* lainnya. Bentuk sinergi dapat dilakukan dalam bentuk *top-down* atau dari skala nasional kepada skala regional, ataupun pada kalangan *stakeholder* berbasis di lokasi tertentu.

Kemudian melakukan mekanisme operasional pemberdayaan melalui pemetaan daerah ataupun subregional dan mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam merencanakan dan menyusun program pemberdayaan sebagai masterpiece program bersama, termasuk didalamnya keseluruhan siklus implementasi program (desain, manajemen, pemantauan dan evaluasi). Pada tahap pelaksanaan, para NGO terus melakukan supervisi dan evaluasi terhadap keberlanjutan program dengan mencanangkan efektifitas program.



Gambar 4. Kerangka Bentuk Sinergi dan Peran antara Aktor

Nilai dan output Sinergi: Dampak dari bentuk sinergi diharapkan dapat mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih efektif dan efisien melalui kolaborasi antara *stakeholder*. Austin dan Seitanidi (2000) berpendapat bahwa pada tingkat masyarakat yang lebih luas, kolaborasi juga dapat berkontribusi terhadap perubahan sistemik yang meningkatkan kesejahteraan dalam pengaturan kelembagaan, hubungan sektoral, nilai dan prioritas masyarakat, dan inovasi layanan sosial dan produk, serta memperbaiki lingkungan dengan banyak manfaat sosial. Dan bagi manfaat internal, bentuk sinergi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait, menciptakan *network* baru, berbagi resiko dan menunjang funding pada lembaga terkait.



Gambar5. KerangkaPenciptaanNilaiKolaborasi

Sumber: Pedersen dan Solerod (2016)

SIMPULAN

Dalam menangani permasalahan sosial, perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat. NGO dinilai sebagai salah satu aktor dalam pembangunan ekonomi negara. Keterbatasan akan sumberdaya manusia, pengalaman dan akses informasi menjadikan program-program pengentasan kemiskinan dinilai kurang maksimal. Dalam hal ini, bentuk sinergi antara institusi dalam menunjang pemberdayaan dinilai dapat lebih efektif dan efisien, serta dapat menjadikan pemberdayaan yang lebih inklusif. Keberhasilan dari sinergitas ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam program-program pengentasan kemiskinan maupun dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan ataupun fasilitas yang lebih struktural pada setiap lembaga ataupun elemen masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam program-program pengentasan kemiskinan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adenansi, D., Zainuddin M., Rusyidi B. (2016). "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri". *Prosiding Kesejahteraan Sosial: Riset & PKM*. Vol. 2. 347-353.
- Alkire, S. (2009). "Concepts and measures of agency. in K. Basu, S. M. R.Kanbur, & A. Sen (Eds.), Arguments for a better world". Essays in honorof Amartya Sen. *Ethics, welfare and measurement* (Vol. 1, pp. 455-474). Oxford, New York: Oxford University Press.
- Angelo, B. (2003). *Empowering the Poor: Local Governance for Poverty Reduction*. UNCDF.
- Austin, J. E. (2000). "Strategic collaboration between nonprofits and businesses". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 29(Suppl. 1), 69-97
- Austin, J. E. Seitanidi M. M. (2000). "A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses. Part 2: Partnership Processes and Outcomes". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 2012, 41, 929-968
- Brautigam, Deborah A, Monique Segarra. (2007) Difficult Partnerships: The World Bank, States and NGOs, Latin American Politics and Society. 49, no. 4
- Brown, Dyann (2009) The Effectiveness of Non-Governmental Organizations (NGOs) within Civil Society. *International Studies Masters*. Paper 75.
- Cleary, S. (1997). *The Role of Ngos Under Authoritarian Rule*. New York: Macmillan Press.
- Kabeer, Naila .(1998). "Resources, Agency, Achievements: Reflection on The Measurement of Women's Empowerment". *Development and Change Vol. 30*, Blackwell Publisher, 435-464
- Dhakal, T. N. (2002). "The Role of Non-Governmental Organization in The Improvement of Livelihood in Nepal", Dessertation, Faculty of Economics and Administration. University of Tampere.
- Darwanto, D. (2013). "Sinergi Antar Instansi Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Kewirausahaan Pemuda (Studi Kasus Di Provinsi DI. Yogyakarta)". Tesis. Magister Adm. Publik. Uiversitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dias, D. D. (2011). "Peran Lembaga Joglo Tani dalam Pengembangan Usaha Tani Padi Organik", Skripsi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Foster, G. (2005) "Bottlenecks and Drip-feeds: Channeling Resources to Communities Responding to Orphans and Vulnerable Children in Southern Africa". Save the Children Humanity Healing

- International (2011) Empowering Girls Pads for Schoolgirls Project, HHC-LCC, Humanity Healing Foundation, Uganda.
- Hutomo, Mardi Y. (2000). "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Tinjauan Teoritik dan Implementasi."
- Karsidi, R. (2001). "Paradigma Baru Penyuluhan dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Mediator*, Vol. 2 No.1. 115-125.
- Kelly, L., Roche, C. (2014). *Partnerships for Effective Development*. Australian Council for International Development.
- Le Ber, M. J., & Branzei, O. (2010). "(Re)forming strategic cross-sector partnerships: Relational processes of social innovation". *Business & Society*, 49(1), 140-172.
- Lewis, D. (2000). "Building 'active' partnership in aid-recipient countries: lessons from a rural development project in Bangladesh". In: Osborne, S. P. (org.). *Public-Private Partnerships: theory and practice in international perspective*. London: Routledge.
- Lewis, D. (2007) *The Management of Non-Governmental Development Organizations*, 2nd Edn. London: Routledge.
- Lewis, D., Kanji, N. (2009.) *Non-Government Organization and Development*. Routledge
- McQuaid, R.W. (2000) The theory of partnership: why have partnerships? In: Osborne, S. P. (ed.) *Public-Private Partnerships: theory and practice in international perspective*. London: Routledge.
- Ministry of Internal Affairs of Uganda (2010) *National NGO Policy-Uganda, Strengthening Partnership for Development*. Uganda.
- Ministry Of Public Health And Sanitation of Harambe (2010) *Training Community Health Committees In Kenya, The Trainers' Manual For Community Health Committees*. Kenya.
- Mohamed, S. (2010). "The Role of NGOs In Urban Poverty Reduction: A Case Study of Kibera", Nairobi. Dissertation Submitted, Manchester University.
- Nano. (2008). "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah", Skripsi, Universitas UIN Sunan Kalijaga.
- Narayan, D. (2000). *Voices of the poor: Can anyone hear us?* New York: Oxford University Press.
- Ndanu, R. K. (2017). "Impact Assessment of Government Empowerment Programmes on Youths Participation in Entrepreneurial Activities In Adamawa State-Nigeria", *IJASEPSM*, Vol. 5, No. 2.
- Pedersen, B. T., Solerod, M. (2016). "Value Creation in Business-Nonprofit Collaboration A Case Study of a Danish Apparel Company". Thesis. Norwegian School of Economics.
- Penrose, A. (2000) Partnership. In: Robinson, D.; Hewitt, T. And Harriss, J. (orgs.). *Managing Development: understanding inter-organizational relationships*. London: Sage and The Open University.
- Pratama,S. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fak. Ekologi Manusia, IPB, Bogor.
- Putra, T. G. (2015). "Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang". *Kebijakan dan Managemen Publik*. Vol 3. No 1.
- Rachman, M. A., Sugiyanto, FX. Syakir, A. K. (2017). "Social Enterprise of Islamic Microfinance in Capital Access and Empowerment of Poor". *Proceeding Conference, 1st International Indonesia Microfinance Forum*, Bank Jateng, Indonesia.

- Riddell, R., Robbinson, M. (1992). "The Impact of Ngo Poverty Alleviation Projects:Results Of The Case Study Evaluations", Working Paper, Result of ODI Reserch Presented In Preliminary Form. London.
- Sahley, C. & Pratt, B. (2003). "NGO responses to Urban Poverty, Service Providers or Partners in Planning", *INTRAC publication, policy series No. 9*, Oxford.
- Scholte, J.A (2004) "The WTO and Civil Society", in B. Hocking and S. McGuire (eds), *Trade Politics*. London: Routledge, second edn, pp. 146-61.
- Stoddard, A. (2006). *Humanitarian Alert: NGO Information and Its Impact on US Foreign Policy*, Bloomfield, Conn.: Kumarian Press.
- Suharko. (2007). "The Roles of NGOs in Rural Poverty Reduction: The Case of Indonesia and India". Working Paper. Interdisciplinary Development Studies of Poverty Reduction Policies. Nagoya University.
- Taufiq. (2013). "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6, No 1. 61-70.
- Trommlerova, S. K., Klasen, s., Lebmann, O. (2015) Determinants of Empowerment in a CapabilityBased Poverty Approach: Evidence from The Gambia.
- Ulleberg, Inger. (2009). "The role and impact of NGOs in capacity development From replacing the state to reinvigorating education". International Institute for Educational Planning. UNESCO. France.
- [39] UNDP (2004) Nepal Human Development Report 2004. Nepal. Jagadamba Press.
- USAID. (2007). *Legal Empowerment of The Poor: From Concepts to Assessment*. US Agency for International Development.
- Vasconcellos, M. Vasconcellosn A. M. (2009). "Partnership, empowerment and local development". *Interações, Campo Grande*, vol. 10, no. 2, 133-148.
- Yamamoto, Tadashi. (1999). *Corporate-NGO Partnership: Learning from Case Studies, CorporateNGO Partnership in Asia-Pacific*, ed. Tadashi Yamamoto and Kim Gould Ashizawa, Tokyo: Japan Center for International Exchange
- World Bank. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington: PREM, World Bank.